



## ***Dinamika Kelembagaan Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Dalam Pengelolaan Hutan Desa Di Kabupaten Bantaeng***

***Kitabullah<sup>1\*</sup>, Supratman<sup>1</sup>, Yusran<sup>1</sup>***

<sup>1</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar

\*Email: [kitabullahsyam15@gmail.com](mailto:kitabullahsyam15@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The role and involvement of members in a group will affect the dynamics that occur in a group to achieve the objectives that have been set together. This research was conducted on two BUMDes, namely BUMDes Ganting in Labbo Village and BUMDes Sipakainga in Pattaneteang Village, Tompobulu District, Bantaeng Regency, South Sulawesi. The data was collected through interviews with the chairman and members of the BUMDes as many as 4 people in each BUMDes who were selected by purposive sampling. The results of the interview were then analyzed using descriptive analysis based on 9 elements of institutional dynamics with a likert scale. The results showed that BUMDes Ganting belongs to the dynamic category, where group effectiveness is an element that affects group dynamics. Meanwhile, the Sipakainga BUMDes is included in the non-dynamic category, where group tensions are an element that affects the dynamism of the BUMDes.*

**Keywords:** *BUMDes, Institutional Dynamics, Village Forest*

DOI:10.24259/jhm.v13i1.12051

### **1. PENDAHULUAN**

Sumberdaya hutan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup manusia. Hutan dapat memberikan hasil berupa kayu, bukan kayu, perlindungan siklus air, penyerapan karbon, pemeliharaan keanekaragaman hayati dan habitat, serta sebagai tujuan rekreasi. Tiga dekade terakhir, sumberdaya hutan telah memberikan kontribusi yang relatif signifikan dalam pembangunan di Indonesia, karena sumberdaya hutan merupakan salah satu kekayaan alam (*natural capital*) yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan aliran pendapatan baik kepada negara maupun lebih khusus kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan lestari mutlak diperlukan.

Kebijakan pembangunan kehutanan telah mengalami perkembangan sejalan dengan adanya UU No. 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah, yaitu yang semula bersifat sentralistik menjadi bersifat desentralistik. Adanya desentralisasi dibidang kehutanan memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan konsep yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan (Nandini, 2013).



Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan salah satu pendekatan pengelolaan hutan yang harus memperhatikan keberlanjutan ekosistem hutan, dan peduli dengan masyarakat di sekitar hutan. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa atau Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional (Puspaningrum, 2011). PHBM merupakan istilah lain dari perhutanan sosial yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan yang memiliki berbagai model seperti Hutan Kemasyarakatan, Hutan Rakyat, Hutan Desa dan lain-lain.

Program hutan desa merupakan salah satu bentuk devolusi pengelolaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah demi terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Hutan desa pada prinsipnya adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat dalam organisasi administratif pedesaan yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Artinya, hutan desa itu bermaksud untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui kelembagaan desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari, dengan harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan (Supratman dan Sahide, 2010).

Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan kegiatan hutan desa. Berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehutanan No.55/Menhut-II/2010 tanggal 21 Januari tahun 2010, hutan desa di Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 Ha. Tahap awal program diimplementasikan pada tiga lokasi di Kecamatan Tompobulu yaitu Desa Labbo seluas 342 Ha, Desa Pattaneteang seluas 339 Ha dan Kelurahan Campaga seluas 23,68 Ha. Kawasan hutan yang dijadikan hutan desa merupakan kawasan hutan dengan fungsi lindung. Ketiga hutan desa tersebut memiliki karakteristik potensi dan sumberdaya yang berbeda yang potensial untuk dikembangkan khususnya Hutan Desa Labbo dan Hutan Desa Pattaneteang.

Pengembangan pengelolaan hutan desa memerlukan peran kelembagaan yang kuat. Dinamika kelembagaan merupakan faktor yang menentukan dalam pengembangan suatu kelompok terhadap proses pencapaian tujuannya. Menurut Kusnani dkk (2015) Dinamika kelembagaan atau dinamika kelompok dipandang sebagai kekuatan-kekuatan didalam suatu kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan perilaku anggota kelompok guna mencapai tujuan kelompok.

Lebih lanjut Rimbawati dkk (2018) menjelaskan bahwa dinamika kelembagaan atau dinamika kelompok sangat penting dikaji dalam rangka meningkatkan kekuatan kelembagaan dalam mencapai tujuannya.

Kedinamisan suatu kelompok ditandai dengan adanya interaksi, baik di dalam maupun di luar kelompok, agar dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif (Poluan dkk., 2017). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Bowo dkk (2011) menjelaskan bahwa adanya interaksi dalam kelompok membuat kelompok atau lembaga tersebut semakin efektif dan dinamis. Interaksi yang terjalin dalam suatu lembaga mampu menciptakan pembagian tugas yang baik, dan anggota dalam lembaga tersebut dapat mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan guna mencapai tujuan utama lembaga.

Penelitian ini berfokus pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Ganting di Desa Labbo dan BUMDes Sipakainga yang terdapat di Desa Pattaenetang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Kedua BUMDes tersebut dijadikan sebagai objek penelitian, karena kedua BUMDes merupakan lembaga desa pertama pengelola hutan desa yang ada di Kabupaten Bantaeng yang sudah terbentuk sejak tahun 2010 yang keduanya telah mengalami dua kali pergantian kepengurusan. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka melihat sejauh mana tingkat kedinamisan lembaga BUMDes dalam proses pengelolaan hutan desa.

## **2. METODE PENELITIAN**

### *2.1 Waktu dan Tempat*

Penelitian ini difokuskan pada Hutan Desa Labbo dan Hutan Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Februari sampai dengan bulan April 2019.

### *2.2 Metode Pengambilan Data*

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *mixed methods*. Sugiono (2014) menjelaskan bahwa *mixed methods* adalah perpaduan antara metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif yang dimaksud adalah suatu bentuk penelitian yang mendeskripsikan peristiwa atau kejadian, mengenai perilaku seseorang atau keadaan pada suatu tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara menggunakan kuisisioner, studi literatur, dan dokumentasi. Pengumpulan data

dengan melakukan tanya jawab terhadap responden secara langsung dengan menggunakan kuisioner wawancara yang telah dibuat. Data ini terdiri atas, Identitas responden (nama, pekerjaan, umur dan jenis kelamin) dan sembilan unsur dinamika kelembagaan yang dikaji yaitu tujuan, struktur, fungsi tugas, pengembangan dan pembinaan, kekompakan, suasana, ketegangan, keefektifan dan maksud tersembunyi. Kemudian dilakukan pengukuran kedinamisan lembaga menggunakan *skala likert* untuk melihat sejauhmana kedinamisan lembaga BUMDes dalam mengelola hutan desa

Penarikan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiono (2016) *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan perorangan atau pertimbangan peneliti. Jumlah responden yang dikumpulkan sebanyak 4 orang masing pada dua BUMDes yakni ketua dan anggota-anggotanya. Jumlah tersebut dianggap telah mewakili responden pada masing masing-masing lembaga.

### 2.3 Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dengan metode wawancara dalam penelitian ini diolah serta diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif yaitu memberikan gambaran informasi secara jelas hasil dari gambaran informasi akan diinterpretasikan sesuai dari hasil penelitian yang didukung oleh teori yang berkaitan dengan objek penelitian dan skala likert yaitu dengan jenjang 1 (Tidak dinamis), 2 (Kurang dinamis), 3 (Dinamis) dengan data yang dihasilkan dari *skala likert*. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan dari setiap konsep pengukuran variabel. Untuk mengetahui kedinamisan kelompok dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan tiap-tiap skor unsur dinamika kelompok.

Makawekes dkk (2016) mengemukakan bahwa, untuk menghitung jumlah skor tertinggi seluruh pertanyaan yaitu dengan mengalikan skor tertinggi dengan jumlah pertanyaan responden pada masing-masing BUMDes. Untuk menghitung jumlah skor terendah digunakan cara yang sama tetapi menggunakan skor terendah dikalikan dengan jumlah pertanyaan dan jumlah responden pada masing-masing BUMDes. Sedangkan untuk menentukan skor ideal atau batas atas dan skor terendah atau batas bawah untuk setiap kriteria atau unsur penilaian dengan mengalikan skor dari kriteria jawaban dengan jumlah responden. Sehingga diperoleh jumlah keseluruhan skor dari penilaian setiap unsur yaitu:

Skor keseluruhan (total skor) penilaian unsur dinamika kelembagaan pada masing-masing BUMDes,

$$S_{\text{Maks}} = 60 \times 4 \times 3 = 720$$

$$S_{\text{Min}} = 60 \times 4 \times 1 = 240$$

Skor penilaian tiap unsur/indikator pengukuran unsur dinamika kelembagaan untuk menentukan kelas interval tiap pengukuran,

$$S_{\text{Maks}} = 4 \times 3 = 12$$

$$S_{\text{Min}} = 4 \times 1 = 4$$

Berdasarkan jumlah skor tertinggi maka dibuat tiga kategori yaitu tidak dinamis, kurang dinamis, dan dinamis dengan interval nilai (kelas) yang akan ditentukan dari pengukuran antara skor maksimum dikurangi skor minimum dibagi dengan jumlah kategori. Secara matematis interval kelas pengkategorian dinamika kelembagaan adalah (Sumantri dan Hastuty, 2016):

$$i = \frac{a - b}{k}$$

keterangan:      i      = interval kelas  
                         a      = jumlah skor maksimal  
                         b      = jumlah skor minimum  
                         k      = jumlah kelas/kategori

$$i = \frac{720 - 240}{3} = 160$$

jadi perhitungan secara matematis interval kelas keseluruhan skor pada masing-masing BUMDes yaitu 160 maka pembagian kategori adalah:

$$\text{tidak dinamis, dengan skor} = 240 - 400$$

$$\text{kurang dinamis dengan skor} = 401 - 561$$

$$\text{Dinamis dengan skor} = 562 - 720$$

Sedangkan interval kelas untuk pengukuran setiap unsur/indikator dinamika kelembagaan pada masing-masing BUMDes adalah:

$$i = \frac{12 - 4}{3} = 3$$

$$\text{tidak dinamis, dengan skor} = 4 - 6$$

$$\text{kurang dinamis dengan skor} = 7 - 9$$

$$\text{Dinamis dengan skor} = 10 - 12$$

Untuk menghitung kedinamisan kelembagaan yaitu dengan menjumlahkan skor dari jawaban setiap pertanyaan dengan rumus:

$$Y = Y1 + Y2 + Y3 + \dots$$

Keterangan:

Y = Dinamika kelembagaan

Y1, Y2, Y3, dst = Variabel yang digunakan dalam mengukur dinamika kelembagaan

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Sejarah Singkat Pembentukan BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes merupakan usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dimana kepemilikan modal dan pengelolaannya dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Tujuan dari dibentuknya BUMDes merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan (Ramadana *et al*, 2013).

Pada tahun 2010 pemerintah Kabupaten Bantaeng melalui program desa mandiri telah membangun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada tiap desa di Kabupaten Bantaeng termasuk Desa Labbo dan Desa Pattaeneteang. BUMDes tersebut diharapkan menjadi bahan usaha yang memfasilitasi masyarakat membangun dan mengembangkan unit-unit usaha yang potensial pada tiap desa.

Pembangunan hutan desa berimplikasi kepada terciptanya kepastian hak masyarakat mengelola sumberdaya hutan, terciptanya keteraturan masyarakat dalam mengelola hutan, serta terciptanya keadilan sosial dalam pengelolaan hutan. Pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada masyarakat sekitar hutan lindung di desa labbo telah mengubah sistem hak tradisional menjadi hak formal yaitu Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Di Desa Labbo, BUMDes Ganting ditunjuk oleh pemerintah desa menjadi Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD).

BUMDes Ganting dan BUMDes Sipakainga selaku pengelola Hutan Desa memiliki beberapa aturan dan larangan antara lain petani hutan desa harus menandatangani surat perjanjian dengan pengurus BUMDes dengan penekanan bahwa hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan, dilarang memindahtangankan atau mengagunkan, serta

mengubah status dan fungsi kawasan hutan. status petani terhadap lahan garapan dalam area hutan desa adalah sebagai penggarap atau dalam bahasa lokal disebut *patesang*.

Penetapan luas area garapan dan batas-batas lahan yang dikelola oleh setiap petani ditentukan oleh BUMDes dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Luas area lahan garapan yang digarap oleh satu orang petani maksimal 0,5 Ha, dan hanya boleh mengelola satu lahan garapan. Masa garapan hutan desa selama 30 tahun dan dievaluasi tiap 5 tahun. Setiap petani dilarang mengubah status dan fungsi kawasan hutan desa, dilarang memindahtangankan hak penggarapan, menggadaikan dana tau menjaminkan, dilarang menebang pohon, dilarang menggerek pohon yang dapat menyebabkan kematian pohon kecuali untuk pohon yang diambil getahnya atau kulitnya seperti nangka, kayu manis, karet dan lain-lain. Selain itu juga dilarang membakar belukar atau rumput untuk membersihkan lahannya dan atau untuk perluasan lahan, dilarang mengambil hasil hutan pada lahan orang lain seperti rotan, bambu, madu, jamur, dan tanaman hias tanpa izin dari petani penggarap lahan tersebut, dilarang mengembalakan ternak pada lahan orang lain tanpa seizin dari petani penggarapnya.

### 3.2 Unsur-Unsur Dinamika Kelembagaan

Dinamika kelembagaan diartikan sebagai suatu studi ilmiah tentang interaksi dalam lembaga terhadap berbagai unsur yang terdapat dalam dinamika kelembagaan. Dinamika kelembagaan ini diukur berdasarkan 9 unsur yakni tujuan, struktur, fungsi tugas, pengembangan dan pembinaan, kekompakan, suasana, ketegangan, keefektifan dan maksud tersembunyi.

#### 3.2.1 Tujuan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. BUMDes Ganting dan BUMDes Sipakainga selaku lembaga pengelola hutan desa memiliki tujuan dalam pengelolaan hutan desa diantaranya:

- a. Mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa;
- b. Meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif anggota (berwirausaha) masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

- c. Meningkatkan pendapatan asli desa; dan
- d. Meningkatkan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua BUMDes tersebut memiliki perumusan tujuan yang sama dalam proses pengelolaan hutan desa. Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil bahwa unsur dinamika kelembagaan BUMDes pada BUMDes Ganting termasuk dalam kategori dinamis karena semua anggota BUMDes mengetahui tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan BUMDes Sipakainga termasuk dalam kategori kurang dinamis. Hal tersebut terjadi karena anggota masih kurang memahami kejelasan tujuan yang ingin dicapai oleh BUMDes. Kondisi ini terjadi karena direktur BUMDes tidak lagi fokus untuk mengembangkan BUMDes Sipakainga dalam mencapai tujuan awal semenjak BUMDes tersebut dibentuk.

Tabel 1. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Tujuan

No.	Tujuan	Skor	
		BUMDes Ganting	BUMDes Sipakainga
1.	Kejelasan tujuan kelompok	12	9
2.	Tujuan sebagai dasar kegiatan	12	7
3.	Tujuan sebagai pengukur kemajuan yang telah dicapai	9	6
4.	Kesesuaian tujuan kelompok dengan tujuan anggota	12	10
5.	Kaitan tujuan dengan motivasi	12	10
6.	Dimensi waktu tujuan kelompok	4	6
<b>Total Skor</b>		<b>61</b>	<b>48</b>

### 3.2.2 Struktur

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, struktur dari kelembagaan BUMDes Ganting termasuk dalam kategori dinamis. Hal tersebut terjadi karena struktur pembagian tugas dalam lembaga sudah jelas. Struktur BUMDes Ganting terdiri atas direktur, sekretaris, bendahara, seksi-seksi, dan unit-unit usaha. Pembagian tugas-tugas didasarkan pada kemampuan atau *skill* yang dimiliki, serta kedekatan atau hubungan erat antar anggota. Lainnya halnya pada BUMDes Sipakainga yang termasuk dalam kategori kurang dinamis karena sejauh ini belum terdapat ketua atau direktur pada BUMDes Sipakainga yang ada hanyalah pelaksana tugas, sehingga pembentukan dan pembagian

tugas dalam lembaga tidak jelas dan berpengaruh terhadap komitmen anggota untuk tetap berada atau bergabung dalam kelompok.

Tabel 2. Dinamika Kelompok Berdasarkan Unsur Struktur

No.	Struktur	Skor	
		BUMDes Ganting	BUMDes Sipakainga
1.	Pembentukan struktur kelompok	12	4
2.	Pembagian tugas dalam kelompok	12	6
3.	Keterlebitan anggota dalam pengambilan keputusan kelompok	12	8
4.	Proses komunikasi dalam kelompok	12	7
5.	Solidaritas dalam kelompok	11	7
6.	Aspek kualitatif (aturan) yang dipakai dalam kelompok	11	9
7.	Sarana dan prasarana dalam berinteraksi	12	11
8.	Pencapaian tujuan, monitoring dan evaluasi	10	4
<b>Total Skor</b>		<b>92</b>	<b>56</b>

### 3.2.3

### 3.3. Potensi Agroforestri di Kelurahan Jawi-jawi

Pendapatan total petani dihitung dalam jangka waktu satu tahun terakhir sesuai dengan yang diperoleh petani dari masing-masing pekerjaan baik dari agroforestri maupun dari luar agroforestri. Pendapatan agroforestri meliputi pendapatan yang diperoleh dari penjualan hasil kebun seperti cengkeh, merica dan lainnya. Pendapatan dari luar agroforestri meliputi penerimaan dari hasil bertani, jasa dan lainnya. Pendapatan petani di Kelurahan Jawi-jawi dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Pendapatan petani agroforestri di Kelurahan Jawi-jawi

<b>Sumber Pendapatan</b>	<b>Pedapatan Total (Rp/Th)</b>	<b>Rata-rata Pendapatan/tahun (Rp/th)</b>	<b>Presentase (%)</b>
Agroforestri			
kayu	40.675.890	5.084.486	8
Pertanian	21.793.000	2.724.125	4,44
Perkebunan	289.673.250	36.209.156	58,96
Buah-buahan	31.196.750	3.899.594	6,35
Non agroforestri			
pedagang	52.000.000	13.000.000	10,58
peternak	26.000.000	13.000.000	5,29
pensiunan	30.000.000	15.000.000	6,11
total	491.338.890	88.917.361	100

Berdasarkan Tabel 3 bahwa pendapatan agroforestri terbagi menjadi tanaman pertanian, kehutanan, perkebunan dan buah-buahan. Tanaman perkebunan seperti cengkeh, vanili, karet dan pala memperoleh sebagian besar dari hasil pendapatan yaitu sebesar 58,96% dikarenakan tanaman tersebut termasuk tanaman yang telah dikembangkan dari sejak dulu serta memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga petani mendapatkan pemasukan secara terus menerus untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu diikuti oleh tanaman berkayu seperti sengon dan bitti sebesar 8%. Kemudian diikuti dengan jenis tanaman buah-buahan sebesar 6,35%. Jenis buah-buahan yang mendominasi di kelurahan Jawi-jawi antara lain durian, langsung dan rambutan. Sebagian besar petani menanam durian dan rambutan sebagai pendapatan sampingan selain cengkeh dan pala sebagai tanaman utamanya. Selain itu petani juga mendapatkan pendapatan

dari tanaman pertanian seperti cabai, jahe, talas dan lainnya sebagai tanaman sampingan diantara tanaman utama yakni sebesar 4,44%.

Pendapatan terbesar dari non agroforestri diperoleh dari pekerjaan sebagai pedagang yaitu sebesar 10,58%. Lalu pendapatan dari gaji pensiun sebesar 6,11%. Pekerjaan sebagai peternak memberikan pendapatan sebesar 5,29%. Dari hasil wawancara banyak petani yang melakukan pekerjaan lain sambil menunggu tanaman di kebun panen. Hal ini disebabkan kurangnya pemasukan petani untuk pemenuhan sehari-hari dan untuk mengisi waktu luang pada saat tidak ada pekerjaan di kebun sehingga petani mendapatkan keuntungan walaupun sedang tidak mengalami panen.

### 3.4 Kontribusi Agroforestri Terhadap Pendapatan Total Masyarakat

Kontribusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumbangan dari usaha kebun campur yang dilakukan di daerah penelitian sebanyak 24 responden. Usahatani agroforestri di Kecamatan Bulukumpa diusahakan oleh para petani untuk memperoleh pendapatan demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pada umumnya, kontribusi yang diperoleh dari hasil agroforestri sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Jika besar kontribusi yang diberikan agroforestri sebesar 10% dari total pendapatan sudah sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan (Suharjito, 2000 dalam Octavianingsih, 2010). Selain dari agroforestri masyarakat di kecamatan Bulukumpa juga memperoleh pendapatan dari kegiatan lain. Pendapatan rumah tangga dari padi, berdagang, berternak atau lain sebagainya baik yang dikerjakan kepala keluarga maupun anggota keluarga. Besaran kontribusi yang dihasilkan dari kegiatan agroforestry terhadap pendapatan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Kontribusi agroforestri terhadap Pendapatan Masyarakat

Sumber Pendapatan	Jumlah Pendapatan	Presentase
Agroforestri	786.696,28	58,69
Non Agroforestri	286.120,00	21,31
Jumlah	1.342.448,73	100

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa kontribusi agroforestri terhadap pendapatan total rumah tangga adalah sebesar 58,69%. Hal ini menunjukkan lebih dari separuh Pendapatan rumah tangga masyarakat berasal dari agroforestri. Pengembangan agroforestri memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan total rumah tangga masyarakat, dan pendapatan tersebut digunakan petani untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti biaya makan sehari-hari, biaya sekolah anak dan lain sebagainya. Dilain sisi kontribusi dari non agroforestri sebesar 21,31%,

hal ini menunjukkan jika masyarakat sangat bergantung pada kebun agroforestrinya sedangkan untuk pendapatan diluar agroforestrinya hanya sebagai sampingan dalam menambah pendapatannya.

#### 4. KESIMPULAN

Potensi pengelolaan lahan perkebunan menjadi lahan agroforestry bagi masyarakat khususnya di Kecamatan Bulukumpa mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan total masyarakat yakni sebesar 78,69%. Dengan melihat besarnya kontribusi yang dihasilkan melalui kegiatan agroforestry, sehingga dengan menggunakan tehnik-tehnik agroforestry yang tepat masyarakat mampu mengadopsi tehnik ini sebagai sebuah sistem yang tepat dalam mengelola lahannya di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Irwanto. 2007. Analisis Vegetasi untuk Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung Pulau Marsegu, Kabupaten Seram Barat, Provinsi Maluku. Sekolah Pasca Sarjana, Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.*
- Nurrochmat. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.*
- Octavianingsih, Dian. 2010. Kontribusi Hutan Rakyat Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Hutan Rakyat (Studi kasus di Kecamatan Ngilpar, Semin dan Paliyan, Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta tahun 2009). Skripsi Fakultas Kehutanan. Institut Pertanian Bogor.*
- Sanchez, P.A. 1995. Science in agroforestry. Agroforestry system 30 ; 5-55 Soekartawi, 1995, Analisis Usaha Tani, UI-Press, Jakarta*
- Widiarti, A. & Sukaesih, P. 2008. Karakteristik Hutan Rakyat Pola Kebun Campuran. Bogor.*